

**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INKLUSIF BERBASIS INFRASTRUKTUR DI SUMATERA
SELATAN**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan dalam Menempuh Derajat Doktor S-3

Administrasi Publik



Oleh

HERMAN DERU

07013682126025

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

Judul Disertasi : Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur di Sumatera Selatan

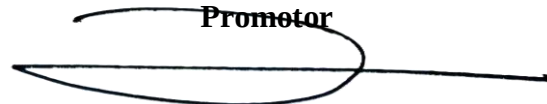
Nama Mahasiswa : HERMAN DERU

NIM : 07013682126025

Program Studi : Doktor Administrasi Publik

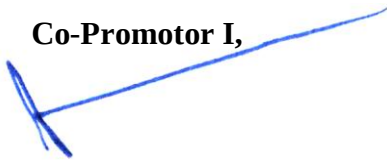
Menyetujui :

Promotor



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

Co-Promotor I,



Dr. Andries Lionardo, M.Si
NIP. 197905012002121005

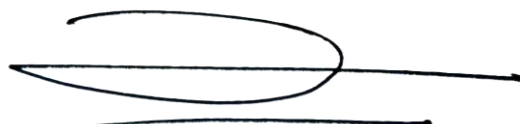
Co-Promotor II,



Dr. Ir. Abdul Najib, M.M
NIP. 196002091986031004

Mengetahui,

Plt. Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004



Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN DERU
NIM : 07013682125025
Tempat/ Tanggal lahir : Belitang, OKUT, 17 Nopember 1967
Program Studi : Doktor Administrasi Publik, FISIP UNSRI
Judul Disertasi : Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif
Berbasis Infrastruktur di Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari Promotor dan Co Promotor yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 28 Juni 2025

Yang Menyatakan,



HERMAN DERU

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN DERU

NIM : 07013682125025

Tempat/ Tanggal lahir : Belitang, OKUT, 17 November 1967

Program Studi : Doktor Administrasi Publik, FISIP UNSRI

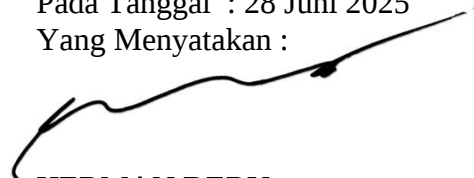
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Doktor Administrasi Publik **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty – Free Rights*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur di Sumatera Selatan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Doktor Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Palembang
Pada Tanggal : 28 Juni 2025
Yang Menyatakan :



HERMAN DERU

ABSTRACT

This study aims to provide an in-depth understanding of the implementation process of inclusive development policies based on infrastructure in South Sumatra Province. Using a qualitative interpretative approach, the research explores how implementing actors, target groups, and policy environments interact and negotiate meanings in realizing the vision of "South Sumatra Progresses for All." The study modifies Thomas B. Smith's conceptual framework by incorporating interpretative, relational, and contextual dimensions to better capture the complexity of implementation practices. The findings reveal that policy implementation does not follow a linear and technocratic path, but unfolds through processes of dialogue, reinterpretation, and institutional adaptation. From this, the DERU Model (Dialogic, Empathic, Responsive for Infrastructure-based Inclusive Development) is proposed, emphasizing the importance of dialogical leadership, cross-actor coordination, and social sensitivity in designing and executing inclusive regional development policies. The model positions infrastructure not merely as a physical output, but as an instrument for achieving spatial and social justice. Conceptually, this study contributes by integrating institutional and interpretative approaches; practically, it offers guidance for implementing inclusive policies in decentralized governance contexts.

Keywords: policy implementation, inclusive development, infrastructure, policy interpretation, DERU model, South Sumatra

Promotor



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Co-Promotor I



Dr. Andries Lionardo, M.Si.
NIP. 197905012002121000

Co-Promotor II



Dr. Ir. Abdul Najib, M.M.
NIP. 19600209 1986031004

Mengetahui,

Plt. Koordinator Program Studi Doktor Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, studi ini menelusuri bagaimana aktor pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan saling berinteraksi dan menegosiasikan makna dalam upaya mewujudkan visi "Sumsel Maju untuk Semua". Kerangka konseptual Thomas B. Smith dimodifikasi dengan penambahan dimensi interpretatif, relasional, dan kontekstual guna menangkap kompleksitas praktik implementasi di lapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan tidak dijalankan secara linier dan teknokratis, melainkan melalui proses dialog, reinterpretasi, dan penyesuaian institusional yang kuat. Dari temuan ini dikembangkan Model DERU (Dialogis, Empatik, dan Responsif untuk Pembangunan Inklusif berbasis Infrastruktur), yang menekankan pentingnya kepemimpinan dialogis, koordinasi lintas aktor, serta kepekaan sosial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Model ini menempatkan infrastruktur sebagai instrumen keadilan spasial dan sosial, bukan sekadar proyek fisik. Kontribusi studi ini bersifat konseptual melalui sintesis pendekatan institusional dan interpretatif, serta praktis dalam memberikan arah implementasi kebijakan inklusif di wilayah yang terdesentralisasi.

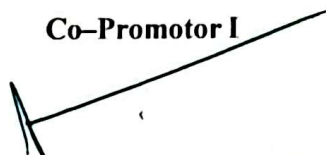
Kata Kunci: implementasi kebijakan, pembangunan inklusif, infrastruktur, interpretasi kebijakan, Model DERU, Sumatera Selatan.

Promotor



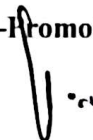
Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Co-Promotor I



Dr. Andries Lionardo, M.Si.
NIP. 197905012002121000

Co-Promotor II



Dr. Ir. Abdul Najib, M.M.
NIP. 19600209 1986031004

Mengetahui,

Plt. Koordinator Program Studi Doktor Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

RINGKASAN

Herman Deru, program Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya 2020.
Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur di Sumatera Selatan. Promotor: Alfitri. Ko-promotor: Andries Lionardo dan Abdul Nadjib.

Pembangunan inklusif menjadi fokus utama dalam berbagai forum pembangunan global dan nasional sebagai respons terhadap model pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan dan partisipasi kelompok rentan. Namun, implementasi pembangunan inklusif sering terhambat oleh tantangan praktis, terutama di Indonesia dengan ketimpangan antarwilayah yang tinggi, seperti di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun memiliki visi "Sumsel Maju untuk Semua", pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah ini masih menghadapi dinamika tafsir, tarik-menarik kepentingan, dan keterbatasan kelembagaan yang memperkuat disparitas antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Sumatera Selatan dan merumuskan model implementasi yang aplikatif serta kontekstual, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan serupa di daerah lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan analisis tematik untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana aktor-aktor kebijakan di tingkat daerah memaknai dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan memperhatikan proses, aktor, tantangan, dan capaian yang terjadi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pembangunan infrastruktur. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pola-pola utama yang muncul dalam data, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan model implementasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif, berdasarkan praktik empiris yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan serupa di daerah lain.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan berlangsung dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai entitas fisik, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan konektivitas sosial yang adil, serta menjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan. Temuan

menunjukkan bahwa infrastruktur berperan sebagai sarana transformasional yang memfasilitasi inklusi sosial, spasial, dan ekonomi. Meskipun kebijakan pembangunan inklusif dirumuskan dalam dokumen formal, implementasinya seringkali mengalami penafsiran ulang di lapangan, tergantung pada kondisi lokal, kapasitas pelaksana, dan keterlibatan warga dalam proses perencanaan.

Melalui analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi delapan kategori utama yang mencerminkan dinamika implementasi kebijakan, seperti peran dukungan fiskal, partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, dan ketahanan infrastruktur terhadap kondisi geografis dan sosial. Kategori-kategori ini disintesiskan menjadi tiga dimensi utama: Aksesibilitas, Partisipasi, dan Ketahanan (Resiliensi), yang masing-masing diintegrasikan dengan nilai-nilai sosial reflektif—Dialog, Empati, dan Responsif. Nilai-nilai ini berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dari temuan ini dikembangkan Model DERU (Dialogis, Empatik, dan Responsif untuk Pembangunan Inklusif berbasis Infrastruktur), yang menekankan pentingnya kepemimpinan dialogis, koordinasi lintas aktor, serta kepekaan sosial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Model ini menempatkan infrastruktur sebagai instrumen keadilan spasial dan sosial, bukan sekadar proyek fisik. Kontribusi studi ini bersifat konseptual melalui sintesis pendekatan institusional dan interpretatif, serta praktis dalam memberikan arah implementasi kebijakan inklusif di wilayah yang terdesentralisasi

SUMMARY

Herman Deru, Doctoral Program in Public Administration, Universitas Sriwijaya, 2020. **The Model of Inclusive Infrastructure Development Policy Implementation in South Sumatra**. Supervisor: Alfitri. Co-supervisors: Andries Lionardo and Abdul Nadjib.

Inclusive development has become a central focus in various global and national development forums as a response to the development model that solely emphasizes macroeconomic growth without considering equitable distribution, participation of vulnerable groups, and spatial justice. However, the implementation of inclusive development is often hindered by practical challenges, particularly in Indonesia, with its high regional disparities, as seen in South Sumatra Province. Although the region has the vision "Sumsel Maju untuk Semua" (South Sumatra, Advancing for All), the implementation of infrastructure development policies in this area still faces issues related to varying interpretations, competing interests, and institutional limitations, which exacerbate regional disparities. This study aims to analyze the implementation of inclusive infrastructure development policies in South Sumatra and develop a contextual and applicable implementation model, with the hope of providing recommendations for strengthening similar policies in other regions.

This research employs a qualitative interpretive approach with thematic analysis to analyze the implementation of inclusive infrastructure development policies in South Sumatra Province. The primary focus of the study is to understand how policy actors at the local level interpret and implement these policies, taking into account the processes, actors, challenges, and outcomes that occur. Data is obtained through in-depth interviews, observations, and analysis of documents related to infrastructure development policies. Thematic analysis is used to identify and categorize key patterns emerging from the data, allowing for a deeper understanding of the dynamics of policy implementation on the ground. Through this approach, the study aims to formulate a contextual and applicable implementation model based on existing empirical practices, while also providing recommendations for strengthening similar policies in other regions.

The study finds that the implementation of inclusive infrastructure development policies in South Sumatra Province takes place within a complex and dynamic social context. Infrastructure is understood not only as a physical entity but also as a tool for creating equitable social connectivity and ensuring public participation, particularly among vulnerable groups. The findings show that infrastructure plays a transformational role in facilitating social, spatial, and economic inclusion. While inclusive development policies are formulated in formal documents, their implementation often undergoes reinterpretation on the ground, depending on local conditions, the capacity of implementers, and the involvement of the community in the planning process.

Through thematic analysis, the study identifies eight key categories reflecting the dynamics of policy implementation, such as the role of fiscal support, community participation, economic impacts, and the resilience of infrastructure to geographic and social conditions. These categories are synthesized into three main dimensions: Accessibility, Participation, and Resilience, each of which is integrated with reflective social values—Dialogue, Empathy, and Responsiveness. These values play a crucial role in creating policies that are more inclusive and adaptive to local needs, as well as strengthening the relationship between government and society to achieve sustainable and just development.

From these findings, the DERU (Dialogic, Empathetic, and Responsive for Inclusive Infrastructure Development) Model is developed, emphasizing the importance of dialogic leadership, coordination across actors, and social sensitivity in designing and implementing regional development policies. This model positions infrastructure as an instrument of spatial and social justice, rather than merely a physical project. The contribution of this study is conceptual through the synthesis of institutional and interpretive approaches, and practical in providing guidance for implementing inclusive policies in decentralized regions.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Disertasi dengan judul **MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF INFRASTRUKTUR DI SUMATERA SELATAN**. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si. sebagai Promotor, Dr. Andries Lionardo, M.Si (Co Promotor), dan Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM (Co Promotor)**. atas ketulusan, kebaikan dan kesabarannya, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada Penulis dalam rangka menyelesaikan disertasi ini dengan baik.

Penulis tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada Penulis mengikuti program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaff, M.SCE, MKU., IPU. ASEAN.Eng, APEC, Eng Rektor Universitas Sriwijaya periode tahun 2015 – 2023 yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada Penulis mengikuti program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., yang juga menjadi Plt Korprodi Doktor Adminiastasi Publik FISIP UNSRI yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada Penulis mengikuti program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Alm Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, Koordinator Prodi Doktor Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada Penulis mengikuti program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya. Semoga Allah Swt memberikan tempat terbaik di Sisi Nya bagi almarhum.
5. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si ; Prof Ir. H. Zainuddin Nawawi, MM., Ph.D; Prof. Dr. Sriati., M.Si; Dr. M. Husni Thamrin, M.Si; dan Dr. Alamsyah., M.Si masing-masing sebagai Penguji Ujian Disertasi saya ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Prodi Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi Penulis.

7. Ibu Arie, Ibu Mareta dan Ibu Fitria selaku staf administrasi Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan Penulis.
8. Para sahabat, jajaran di Pemprop Sumsel dan teman-teman seperjuangan Angkatan V tahun 2021 Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya yang penulis banggakan, yang selalu saling berbagi informasi, pengalaman, dukungan, bantuan dan memotivasi serta mendoakan.
9. Hj. Febrita Lustia istri tercinta bersama anak-anak (almh) Percha Leanputri, Samantha Tivani, Leony Mareza Putri dan Ratu Tenny Leriva yang selalu menjadi spirit, motivasi serta semangat bagi penulis dalam setiap proses penyelesaian pendidikan Doktor Administrasi Publik ini.
10. Serta Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan disertasi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bekal dalam mewujudkan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu PENGABDIAN PADA MASYARAKAT melalui Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan yang saat ini menjadi tempat mengabdikan. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dan dapat menjadi bahan referensi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu administrasi public kedepan.

Palembang, 28 Juni 2025



Herman Deru

RIWAYAT HIDUP PENULIS



H. HERMAN DERU, SH., MM lahir di Sidomulyo pada tanggal 17 November 1967. Penulis merupakan anak ke-6 (enam) dari 14 (empat belas) saudara. Anak dari pasangan H. Hamzah dan Hj. Hayani. Penulis memiliki seorang istri bernama Hj. Febrita Lustia Herman Deru, serta 4 (empat) orang anak yaitu Almh. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., M.BA, Hj. Samantha Tivani, B.Bus., MIB., Leony Marezza Putri, BA, dan dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, S. Ked., MM.

Penulis memulai pendidikan pada SD Negeri 1 Sidomulyo, Belitang lulus tahun 1979, lalu melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Belitang lulus tahun 1982, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 3 Palembang dan lulus pada tahun 1985.

Penulis melanjutkan jenjang perkuliahan pada pendidikan Strata-I Pada Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dan lulus pada tahun 1995, penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Fakultas Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara pada tahun 2008 di Belitang. Selanjutnya pada tahun 2019, penulis mendaftar pada Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Adapun riwayat pekerjaan penulis yaitu pernah menjabat sebagai Bupati OKU Timur Periode 2005-2010, Bupati OKU Timur Periode 2010-2015, Gubernur Sumatera Selatan Periode 2018-2023 dan penulis melanjutkan masa jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Selatan Periode 2025-2030 dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjuangan ku menyelesaikan disertasi ini dengan baik dan penuh kebanggaan.

Disertasi ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih, kedua orang tuaku, istri, anak-anakku dan menantuku, para sahabat terbaikku, dan teman sejawat yang telah memberikan dorongan dan doa yang tiada putus selama perjuanganku menempuh pendidikan ini dari tahun 2019 sampai hari ini.

Halaman persembahan ini juga kutujukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Sriwijaya terhormat, Rektor dan seluruh jajaran dan terkhusus kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajaran dan para dosen yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bantuan penuh sehingga disertasi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

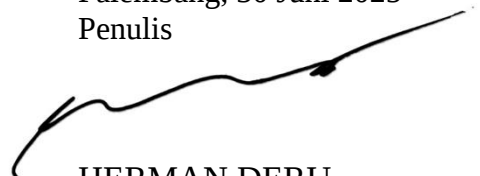
Sungguh suatu perjuangan luar biasa dan capaian yang sangat mengharukan bagi diri saya sendiri, tak pernah terpikirkan, seorang anak petani yang bekerja dari bawah didukung isteri tercinta dapat menempuh pendidikan akademis tertinggi dan meraih gelar Doktor pada hari ini di perguruan tinggi terkemuka.

Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung dan meyemangati dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam perjuangan panjang menempuh pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan Ridho Nya kepada kita semua. Barakallahu fiikum.

"The most important thing isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly". - Sungjin

"Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu berjalan, tetapi bagaimana kamu berjalan sampai garis akhir. Jangan berhenti meskipun kamu berjalan lambat." - Sungjin

Palembang, 30 Juni 2025
Penulis



HERMAN DERU

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	18
2.1 Pendahuluan.....	18
2.2 Konsep dan Agenda Pembangunan Inklusif.....	19
2.3 Infrastruktur Sebagai <i>Enabler</i> Pembangunan Inklusif	24
2.3.1 Infrastruktur dan Transformasi Sosial: Dari Logika Ekonomi ke Keadilan Struktural.....	26
2.3.2 Konektivitas Fisik dan Spasial: Syarat tetapi Tidak Cukup.....	30
2.3.3 Infrastruktur di Sumatera Selatan: Peluang dan Tantangan.....	32
2.4 Ketimpangan Wilayah dan Konteks Sumatera Selatan	33
2.5 Evolusi Pemikiran Dalam Implementasi Kebijakan.....	35
2.6 Kajian Teoritis: Proses Implementasi Sebagai <i>Applied Theory</i>	40
2.6.1 Gagasan Awal Thomas B. Smith: Sistem Implementasi yang Kompleks 41	
2.6.2 Evolusi Pemikiran Teori Proses Implementasi dari Thomas B. Smith...42	
2.6.3 Penyesuaian dalam Studi Ini	44
2.7 <i>Systematic Literature Review</i>	45
2.7.1 Profil Penelitian.....	45
2.7.2 <i>Trend Topic</i>	46
2.7.3 <i>Co-Occurrence</i>	48

2.7.4 <i>Word Cloud</i>	50
2.8 <i>State Of The Art</i> Penelitian	52
2.9 Kerangka Penelitian.....	53
2.10 Posisi Epistemologis Dan Stratifikasi Teori Studi Ini	56
2.10.1 Posisi Epistemologis	56
2.10.2 Stratifikasi Teori.....	56
2.11 Kesimpulan Bab	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Pendekatan Penelitian.....	59
3.2 Paradigma Penelitian	61
3.3 Jenis dan Strategi Penelitian	66
3.4 Fokus Penelitian	72
3.5 Jenis dan Sumber Data	73
3.6 Penentuan Informan.....	75
3.7 Lokasi dan Subyek Penelitian.....	76
3.8 Teknik Pengumpulan Data	77
3.9 Instrumen Penelitian	80
3.10 Keabsahan Data (<i>Trustworthiness</i>).....	82
3.11 Teknik Analisis Data	84
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	89
4.1 Sumatera Selatan Sebagai Arena Implementasi Kebijakan Inklusif	89
4.2 Jejak Sejarah: Warisan Eksklusi dan Proyeksi Inklusi Sosial	90
4.3 Geografi sebagai Penentu Ketimpangan Akses.....	92
4.4 Infrastruktur: Simbol Pembangunan atau Sarana Inklusivitas?.....	95
4.5 Dinamika Penduduk dan Redistribusi Manfaat Pembangunan	120
4.6 Tantangan Lingkungan dan Tanggung Jawab Antar Generasi.....	126
4.7 Indeks Pembangunan Manusia: Menafsirkan Angka lewat Keadilan Sosial	129
4.8 Kondisi Sosial Ekonomi dan Kesenjangan Struktural.....	136
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	147
5.1 Infrastruktur Sebagai Arena Implementasi Pembangunan Inklusif.....	147
5.2 Menelusuri Dinamika Implementasi Melalui Pendekatan Proses	148
5.2.1 Meraba Arah: Visi dan Gagasan Dasar dalam Kebijakan Inklusif	149
5.2.2 Di Balik Layar Pelaksana: Adaptasi, Negosiasi, dan Dinamika Kelembagaan.....	155
5.2.3 Warga sebagai Subjek: Persepsi, Harapan, dan Ruang Keterlibatan	158
5.2.4 Arena yang Tak Netral: Lingkungan Sosial, Politik, dan Geografis yang Membentuk Praktik.....	161
5.3 Membaca Praktik, Menemukan Makna: Pendekatan Tematik.....	164
5.3.1 Peran Dukungan Fiskal dan Sumber Pendanaan.....	166

5.3.2 Dampak Ekonomi dari Konektivitas Infrastruktur.....	173
5.3.3 Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Kelompok Rentan.....	181
5.3.4 Kebijakan Inklusif Dalam Konektivitas Wilayah	187
5.3.5 Implementasi Proyek Infrastruktur: Koordinasi dan Akuntabilitas	193
5.3.6 Ketahanan Infrastruktur terhadap Geografi dan Iklim	199
5.3.7 Kekuatan Struktur Ekonomi dan Kekuasaan Lokal	209
5.3.8 Distribusi dan Pemerataan Infrastruktur ke Wilayah Tertinggal	216
5.4 Sintesis Tematik dan Integrasi Nilai Sosial Reflektif dalam Implementasi Kebijakan: Menemukan Makna Dalam Praktik.....	225
5.4.1 Aksesibilitas dan Responsif	230
5.4.2 Partisipasi dan Dialog serta Empati	231
5.4.3 Ketahanan dan Empati serta Responsif.....	233
5.5 Menuju Model Implementasi Pembangunan Inklusif yang Kontekstual dan Mengakar.....	236
5.6 Menimbang Kegunaan: Implikasi Konseptual dan Praktis	244
5.6.1 Implikasi Praktis	244
5.6.2 Implikasi Konseptual	249
BAB VI PENUTUP	255
6.1 Kesimpulan.....	255
6.2 Saran	258
BAB VII DAFTAR PUSTAKA	261
BAB VIII LAMPIRAN.....	280

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1: Pendekatan Implementasi Kebijakan dan Relevansinya bagi Studi Ini	39
Tabel 3-1 Paradigma Interpretatif	61
Tabel 3-2 Informan dan Peranannya	76
Tabel 4-1 Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	94
Tabel 4-2 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia Tahun 2019-2023	139
Tabel 4-3 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah	140
Tabel 4-4 Indeks Entropi Theil Inter Wilayah.....	141
Tabel 5-1 Sintesis Tematik: Delapan Temuan ke dalam Tiga Kategori Utama .	228
Tabel 5-2 Matriks Sinkronisasi Tematik dan Nilai Sosial Reflektif	229

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Pembangunan Infrastruktur Jokowi 2015	7
Gambar 1-2 Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap (Jalan Nasional dalam Kondisi Baik dan Sedang) di Sumatera Selatan.....	9
Gambar 1-3 Kurva Jalan dengan Kondisi Baik.....	9
Gambar 1-4 Tren PDRB per Kapita Tahun 2013 – 2021 Sumsel & Nasional (Ribu Rupiah).....	10
Gambar 1-5 Tren Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI).....	11
Gambar 1-6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11
Gambar 1-7 Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan.....	12
Gambar 2-1 Profil Penelitian	45
Gambar 2-2 Trend Topic.....	47
Gambar 2-3: Co-occurrence	49
Gambar 2-4 World Cloud.....	51
Gambar 2-5 Kerangka Pemikiran Model Implementasi Pembangunan Inklusif Berbasis Infrastruktur.....	55
Gambar 3-1 Desain Kualitatif	85
Gambar 3-2 Desain Penelitian yang Dilakukan	88
Gambar 4-1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan.....	93
Gambar 4-2 Capaian Kinerja Jalan Provinsi Sumatera Selatan	98
Gambar 4-3 Rekap Kondisi Jalan Prov. Sumatera Selatan 2019-2024.....	99
Gambar 4-4 Peta Infrastruktur	100
Gambar 4-5 Peninjauan Proses Pembangunan Tol Palindra.....	102
Gambar 4-6 Dokumentasi Udara Tol Palindra.....	103
Gambar 4-7 Ruas Tol Kapal Betung.....	103
Gambar 4-8 Kabupaten PALI	106
Gambar 4-9 Ruas Jalan Baturaja – Sp. Martapura	108
Gambar 4-10 Pembangunan Jembatan Sumberejo	109
Gambar 4-11 Pergantian Jembatan Air TPI 1	109
Gambar 4-12 Pembangunan Jembatan Musi IV	110
Gambar 4-13 LRT Sumatera Selatan	111
Gambar 4-14 Dermaga Sri Menanti	112
Gambar 4-15 Bandara Sultan Mahmud Badarrudin II.....	113
Gambar 4-16 Proyek Palapa Ring.....	117
Gambar 4-17 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Sumsel	121
Gambar 4-18 Kondisi Ketenagakerjaan Sumsel	123
Gambar 4-19 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel.....	125
Gambar 4-20 Jalan Lintas Gajah Sumatera.....	127
Gambar 4-21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel, 2020-2024.....	129

Gambar 4-22 Gini Ratio Sumatera Selatan 2024.....	130
Gambar 4-23 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama.....	132
Gambar 4-24 Angka Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sumatera Selatan tahun 2020-2024	133
Gambar 4-25 Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Sumatera Selatan (ribu rupiah), 2020-2024	134
Gambar 4-26 Profil Kemiskinan Sumsel	137
Gambar 4-27 Gini Ratio Sumsel 2020-2024.....	142
Gambar 5-1 Model DERU (Dialogis, Empatik, dan Responsif untuk Inklusi berbasis Infrastruktur)	242

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan inklusif adalah suatu model pembangunan alternatif yang muncul secara spesifik sebagai respon dari adanya beberapa dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang terlalu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi dan lebih berpihak pada kepentingan para pihak *elite* (Aggarwal, 2021; Dörffel & Schuhmann, 2022; Otsuki et al., 2017). Pembangunan inklusif merupakan suatu pembangunan yang memiliki tujuan untuk mendorong semua kelompok masyarakat terutama kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Baud, 2015; Rauniyar & Kanbur, 2010; Rodgers & Rodgers, 2011; Sengupta, 2013).

Namun demikian, ide besar pembangunan inklusif sering terjebak dalam tataran normatif dan retorik. Visi inklusi yang luhur kerap kali tidak menemukan bentuk praksisnya yang utuh di lapangan. Di sinilah muncul kegentingan: bahwa persoalan utama dalam pembangunan bukan lagi pada perumusan visinya, melainkan pada pertanyaan mendasar bagaimana pembangunan inklusif itu benar-benar diimplementasikan? Bagaimana ia bekerja dalam kenyataan sosial yang kompleks, penuh tarik-menarik kepentingan, keterbatasan kapasitas, dan keberagaman tafsir di antara para aktor pembangunan?

Untuk memahami kegentingan implementasi tersebut, kita perlu menengok terlebih dahulu bagaimana konsep pembangunan inklusif dirumuskan dalam berbagai forum global dan nasional. Pembangunan inklusif telah lama menjadi wacana sentral dalam berbagai forum pembangunan global dan nasional. Ia hadir sebagai koreksi terhadap model pembangunan yang terlalu terfokus pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan distribusi hasil, partisipasi kelompok rentan, serta keadilan spasial. Dalam semangat ini, pembangunan inklusif tidak hanya mengandaikan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama

mereka yang selama ini termarginalkan dari arus utama pembangunan (Aggarwal, 2021; Sengupta, 2013).

Strategi utama dalam pembangunan inklusif yaitu dengan menciptakan lapangan kerja produktif serta dapat memberi keuntungan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien dapat berguna untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan juga dukungan kebijakan publik yang memadai (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Kanbur & Rauniyar, 2010b; Xiaoyun & Banik, 2013). Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dibutuhkan peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai agar kesempatan ekonomi dapat terdistribusi merata ke berbagai pelosok wilayah Indonesia (Armah et al., 2014; Bonacin et al., 2010; Sengupta, 2013).

Salah satu faktor penting untuk menciptakan pembangunan inklusif adalah melalui peningkatan konektivitas infrastruktur (Berawi, 2017; Gu, 2017a; Kanbur & Rauniyar, 2010b). Konektivitas infrastruktur sangatlah berpengaruh bagi kegiatan masyarakat karena hal ini dapat menjamin suatu keterhubungan antar wilayah yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada dan dapat mendukung terbaginya distribusi barang dan jasa secara merata pada daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang tidak baik dari daerah tersebut (Berawi, 2017; Fernholz, 2010).

Program percepatan pembangunan infrastruktur juga dapat diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

Dalam konteks Indonesia, negara dengan bentuk geografis yang majemuk dan ketimpangan wilayah yang akut. Pembangunan inklusif memerlukan medium

yang transformatif. Infrastruktur hadir bukan sekadar sebagai benda fisik atau proyek teknis, melainkan sebagai *enabler* utama: penghubung wilayah, pembuka akses, pemantik partisipasi ekonomi dan sosial. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana dasar lainnya menjadi representasi dari kehadiran negara di ruang-ruang pinggiran (Gu, 2017; Kanbur & Rauniyar, 2010). Dalam kapasitas ini, infrastruktur menjadi pemantik integrasi spasial dan sosial: ia menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi, membuka akses bagi kelompok rentan terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, serta memfasilitasi mobilitas fisik dan sosial. Jalan, jembatan, pelabuhan, hingga akses telekomunikasi adalah representasi paling konkret dari kehadiran negara di ruang-ruang pinggiran dan termarginalkan (Zoomers, 2018; Armah et al., 2014).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif, yaitu pembangunan yang dapat mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Triyanti et al., 2017a). Kelompok masyarakat yang inklusif harus dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif saat ini belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara.

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,” (Pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli 2019.)

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, pembangunan inklusif diharapkan dapat tercipta konektivitas

yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemajuan (Chatani, 2012; Triyanti et al., 2017b). Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah (Berawi, 2017; Gu, 2017a). Infrastruktur dalam hal tersebut dapat meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya.

Namun, infrastruktur itu sendiri tidak serta-merta menjamin inklusi. Infrastruktur hanya akan berfungsi sebagai enabler jika dibarengi dengan proses implementasi kebijakan yang peka konteks, partisipatif, dan didorong oleh kepemimpinan yang transformatif (Rauniyar & Kanbur, 2010; Zoomers, 2018). Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa proyek infrastruktur, jika tidak dibarengi dengan proses implementasi kebijakan yang partisipatif, sensitif terhadap konteks lokal, dan dipimpin secara visioner, justru bisa memperparah ketimpangan dan menimbulkan eksklusi baru (Dörffel & Schuhmann, 2022; Otsuki et al., 2017; Markevich et al., 2022). Misalnya, jalan yang dibangun tanpa partisipasi masyarakat bisa memicu konflik sosial, atau jembatan yang tidak terintegrasi dengan strategi ekonomi lokal hanya akan menjadi monumen teknis tanpa makna ekonomi.

Oleh karena itu, infrastruktur hanya akan berfungsi sebagai enabler ketika keberadaannya dikawal oleh proses implementasi kebijakan yang hidup dan dinamis, bukan linear dan birokratis. Implementasi semacam ini mensyaratkan keterlibatan berbagai aktor secara deliberatif, proses negosiasi makna atas kebijakan, serta hadirnya kepemimpinan yang transformatif dan adaptif, yang mampu menyatukan fragmentasi dan mendorong inklusi sejati (Rodgers & Rodgers, 2011; Baud, 2015). Studi ini berangkat dari kesadaran bahwa hardware pembangunan tidak cukup; yang diperlukan adalah software berupa praktik sosial yang kontekstual dan nilai-nilai yang melandasinya.

Dengan demikian, masalah sentral yang hendak dijawab dalam studi ini bukan pada relevansi pembangunan inklusif, tetapi pada bagaimana kebijakan

pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dapat diimplementasikan secara nyata, efektif, dan berkeadilan. Sebab di sinilah titik kritis pembangunan Indonesia: adanya jurang lebar antara dokumen kebijakan dan realitas lapangan; antara retorika inklusi dan praktik eksklusif yang masih berlangsung.

Langkah strategis Presiden Jokowi dengan menjadikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju pada periode kedua pemerintahannya, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalannya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya perlu terus didukung agar terjadi akselerasi keberlanjutan implementasinya.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perhatian penting Penulis dalam rangka mencari solusi untuk mencapai produksi dan produktivitas yang lebih optimal.

Langkah strategis yang ditetapkan secara nosional akan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, karena keberlanjutan pembangunan infrastruktur memainkan peranan vital dalam sektor ekonomi, hal tersebut didukung oleh pernyataan dari World Bank bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen pula. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Tercipta peningkatan produktivitas dan memberikan *multiplier effect* atau efek pengganda yang lebih besar karena akan tumbuh investasi yang dapat menunjang berkembangnya industri pengolahan, sehingga tidak selamanya Indonesia tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah. Masyarakat tentunya berharap dengan adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan dapat dapat membawa manfaat yang lebih besar pemerataan pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan (1963) misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama *big-push theory*. Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Brandao & Saraiva, 2008; Makbul et al., 2019; Mohanty et al., 2020; Nelson et al., 2022; Tangney, 2020).

Dalam pembangunan infrastruktur lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan dapat menjadi penentu bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Gu, 2017a; Holis et al., 2018; Kanbur & Rauniyar, 2010b; Makbul et al., 2019). Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas (Jin & Stough, 1996; Makbul et al., 2019). Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan *social overhead capital* atau barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi (Brandao & Saraiva, 2008; Makbul et al., 2019; Mohanty et al., 2020; Nelson et al., 2022; Tangney, 2020)



Gambar I-1 Pembangunan Infrastruktur Jokowi 2015

Sumber: Bappenas, 2015

Masifnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat terus dijamin keberlanjutannya guna mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif dalam mempercepat pemetaan pembangunan dan menggerakkan ekonomi produktif rakyat, sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global (*regional and global production chain*) yang berperan dalam meratakan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia maju melalui pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju 2045.

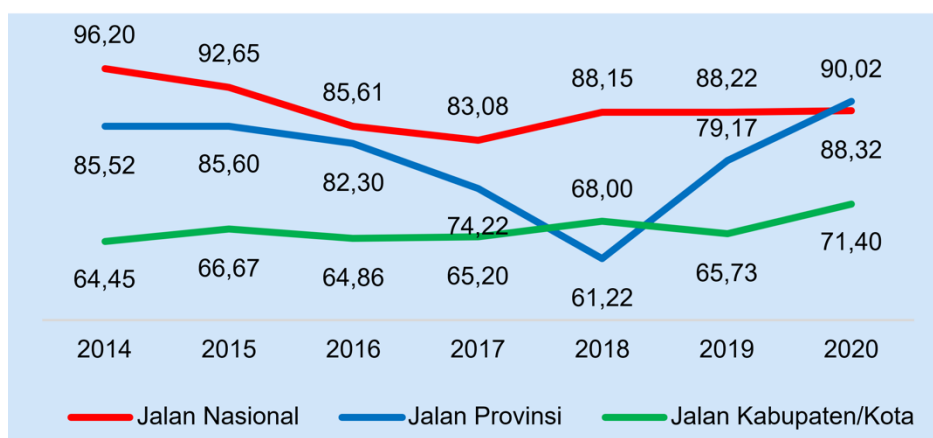
Sebagai turunan dari Program Strategis Nasional, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2018 telah memprogramkan percepatan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan produksi dan produktivitas masyarakat. Program ini merupakan wujud dari janji politik yang kemudian diakomodir dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas kebijakan ekonomi di

Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota dan pengembangan ekonomi daerah. Program percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai wilayah dengan dinamika spasial yang kompleks, ketimpangan antarwilayah, dan ambisi kuat untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang masif, menjadi studi kasus yang relevan dan signifikan. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur sejak 2018, dengan visi "Sumsel Maju untuk Semua". Namun, bagaimana program-program tersebut dijalankan, dimaknai, dan dirasakan oleh para pelaku pembangunan serta masyarakat akar rumput? Apakah infrastruktur telah menjadi jembatan keadilan, atau justru memperkuat segregasi yang ada?

Infrastruktur juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Sumatera Selatan, antara lain dalam hal peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Adanya infrastruktur yang inklusif di Sumatera Selatan berdampak pada kualitas hidup manusia yang dapat dilihat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas dari pembangunan manusia agar dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas yang memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi hidup di Provinsi Sumatera Selatan.

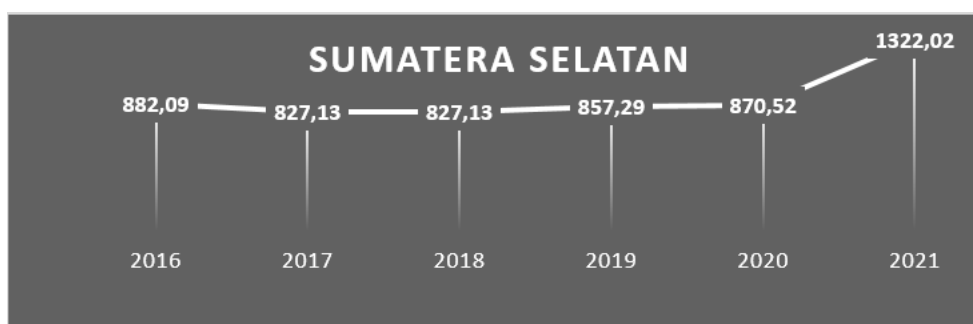
JALAN KONDISI MANTAP



Gambar I-2 Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap (Jalan Nasional dalam Kondisi Baik dan Sedang) di Sumatera Selatan

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Grafik 1.2 menunjukkan persentase Jalan dengan Kondisi Mantap dari 2014-2020. Secara umum, Kondisi jalan nasional mengalami penurunan dari 96,20% menjadi 90,02% di periode tersebut. Sementara itu, kondisi jalan Kabupaten/Kota sedikit meningkat dari 64,45% menjadi 71,40%, mengalami sedikit peningkatan. Kondisi jalan provinsi sempat mengalami penurunan dari 85,52% di 2014 menjadi 61,22% di 2018, merupakan titik terendah kondisi jalan. Persentase kondisi jalan mantap mengalami kenaikan secara signifikan dari 2018-2020 menjadi 90.02% melampaui kondisi jalan nasional yang mantap.

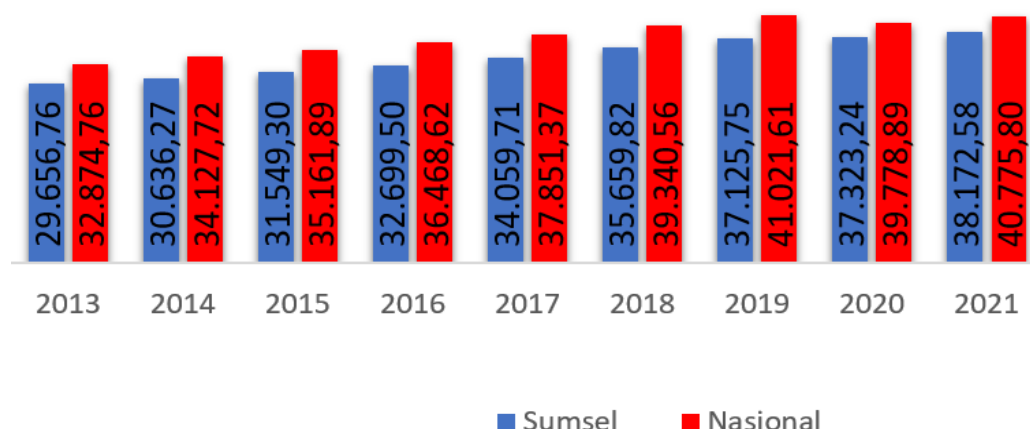


Gambar I-3 Kurva Jalan dengan Kondisi Baik

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2022

Grafik 1.3 menunjukkan presentase jalan dalam kondisi baik dari tahun 2016-2021. Secara umum, kondisi jalan di Sumatera Selatan cenderung stabil meski

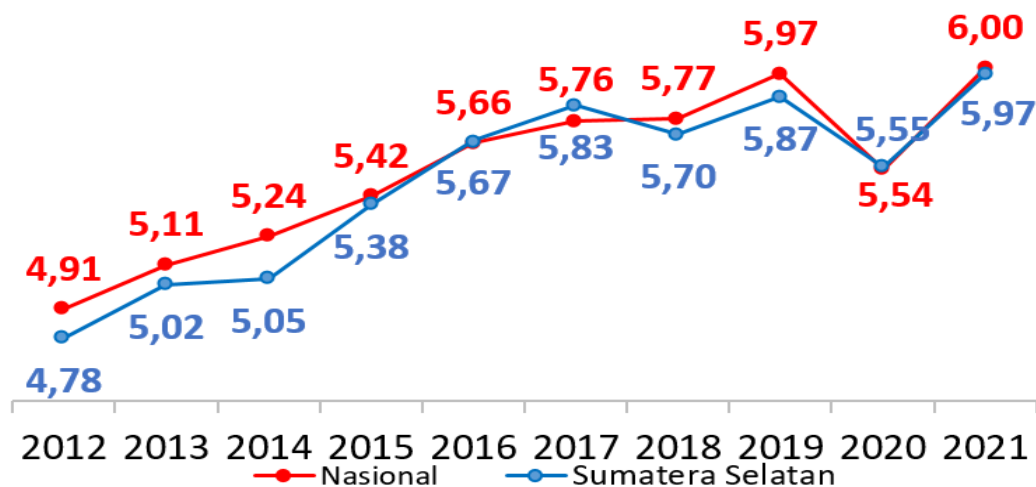
pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 827,13 km. Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 857,29 km dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 870,52 km. Kondisi jalan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 1322,02 km.



Gambar I-4 Tren PDRB per Kapita Tahun 2013 – 2021 Sumsel & Nasional (Ribuan Rupiah)

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Pembangunan infrastruktur ini membawa dampak positif. Pertama, sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.4 PDRB perkapita naik. Secara lebih detail, PDRB per Kapita 2021 Sumatera Selatan meningkat menjadi sebesar Rp. 38,17 juta meskipun masih dibawah nasional yang juga meningkat menjadi sebesar Rp. 40,77 juta. Secara lebih detail, dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel tahun 2021, terdapat 2 Kab dan 1 Kota yang PDRB per Kapita diatas Nasional dan Provinsi yaitu Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Kota Palembang.



Gambar I-5 Tren Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.5, IPEI Sumatera Selatan 2021 sebesar 5,97%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,55%. Namun masih lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 6%. Secara lebih detail, Kabupaten/Kota dengan IPEI terbesar 2021 dan lebih besar dari IPEI Nasional dan Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang (6,02). Sementara IPEI terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang (4,76), OKU Selatan (4,93) dan PALI (5,01).

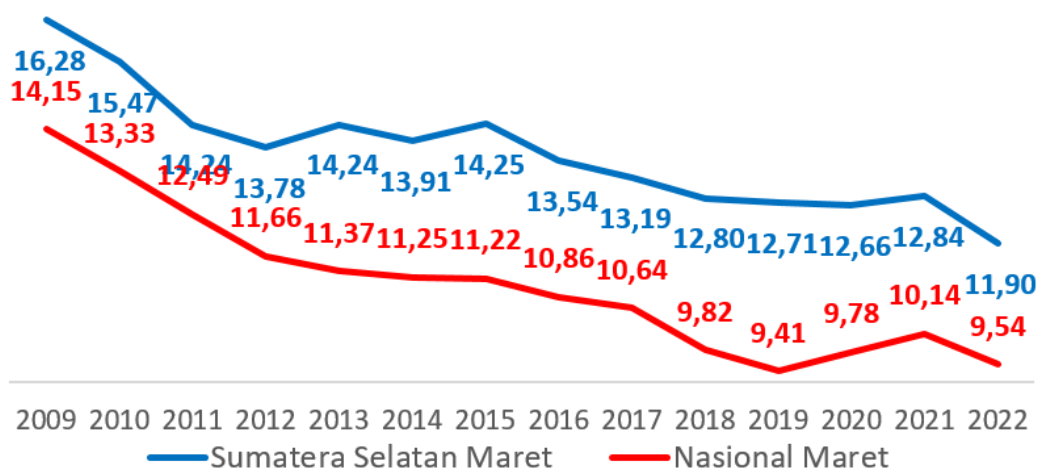


Gambar I-6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022

Dampak lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka yang menurun sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.6. TPT Sumatera Selatan dari tahun 2011-2022 berfluktuatif, namun capaiannya selalu lebih baik dari Nasional. TPT Sumsel

mengalami Penurunan dari 2021 ke 2022 (turun 0,63%), hal ini terjadi juga pada rata-rata nasional (0,35%). Penurunan TPT di Sumatera Selatan tahun 2022 disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 4,29 juta orang, bertambah sebanyak 109,99 ribu orang dibanding Agustus 2021 dengan peningkatan penyerapan TK paling tinggi di sektor pertanian, kehutanan, perikanan (112,74 ribu). Ada 5 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan TPT tertinggi (Palembang, Lubuk Linggau, Muratara, Prabumulih dan OKUT).



Gambar I-7 Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan

Sumber: Bappeda Sumatera Selatan, 2022.

Sebagaimana terdapat dalam gambar 1.7, Pasca Pandemi COVID-19, Tren Kemiskinan Provinsi Sumsel mengalami Penurunan Menjadi 11,90% pada Maret 2022. Pada Maret 2022, terdapat delapan Kabupaten/Kota tingkat kemiskinan Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota Nasional. Kabupaten/Kota yang mengalami Penurunan Angka kemiskinan secara signifikan pada tahun 2021-2022 adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (turun sebesar 1,66%), Ogan Ilir (turun sebesar 1,49%) dan OKI (turun sebesar 1,45%).

Ketidakmerataan infrastruktur dipandang berkontribusi signifikan penurunan angka kemiskinan mengupayakan nilai dinamika pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur pada ketidakmerataan hasil pembangunan.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah menyediakan sistem infrastruktur berkualitas tinggi dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan lebih tinggi. Sumatera Selatan, dalam hal ini, telah menjadi laboratorium untuk memahami potensi dampak infrastruktur dalam mendorong pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan telah terbukti menurunkan biaya transportasi, mendorong perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengalihkan tenaga kerja pertanian ke kegiatan non-pertanian yang diharapkan menciptakan pembangunan inklusif dan mengurangi kemiskinan. Sebagai dampak dari dana desa dan alokasi dana desa, pembangunan ekonomi memiliki dampak pada penduduk pedesaan (Arifin et al., 2020; Faoziyah & Salim, 2020; Triyowati et al., 2019). Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan inklusif dalam pengentasan kemiskinan pedesaan.

Konsep pembangunan inklusif telah diterapkan dalam berbagai bidang. Di sektor privat, sebagai contoh, konsep ini menjadi basis dalam pengembangan model pengembangan bisnis baru (Rauniyar & Kanbur, 2010). Dengan tujuan inklusi, bisnis adalah hasil dari pencapaian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menyediakan sumber daya dan mempromosikan kesetaraan kesempatan (Dai, 2016; Kourula et al., 2017; Leong et al., 2020; Markevich et al., 2022; Oloruntoba, 2015; Singh, 2013). Di bidang keuangan, keuangan inklusif mengubah eksklusi keuangan tradisional, yang memainkan peran perantara penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Buhr & Castiglioni, 2017; Fernandes Antunes et al., 2018; S. Kumar et al., 2019). Dalam bidang perencanaan dan pembangunan kota, kota inklusif telah diperkenalkan sebagai model desain perkotaan yang baru. Di bidang tata kelola masyarakat, telah dibahas hubungan antara sensitivitas iklim dan inklusi masyarakat (Borie et al., 2019; Bourgeois, 2014; Lee et al., 2022). Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa kepekaan iklim sangat erat kaitannya dengan inklusi masyarakat, karena masyarakat miskin lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang dapat diatasi dengan penyediaan infrastruktur. Dapat dilihat dari penelitian di atas bahwa posisi strategis makro dari pertumbuhan inklusif telah dikonfirmasi, tetapi jalur implementasi mikro perlu

dieksplorasi; namun, di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, belum ada penelitian yang relevan.

Proyek infrastruktur adalah sangat penting. Pengaruh positif infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum telah dikonfirmasi dalam berbagai macam penelitian (Berawi, 2017; Fernholz, 2010; Gu, 2017a; Kanbur & Rauniar, 2010b; Zoomers, 2018). Pengaruh infrastruktur terhadap ekonomi terutama berfokus pada efek pertumbuhan dan efek distribusi pendapatan. Infrastruktur adalah barang publik atau semi publik, yang menentukan bahwa infrastruktur harus memiliki misi untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Jika kekuatan pasar memperburuk ketimpangan pendapatan, intervensi pemerintah tidak dapat dihindari. Elemen penting dari intervensi pemerintah adalah di mana pemerintah membelanjakan uangnya. Oleh karena itu, investasi infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam model pertumbuhan ekonomi berbasis investasi (Brandão et al., 2012; Cheah & Liu, 2006; Valdivieso & Andersson, 2018).

Ketidakseimbangan investasi infrastruktur mungkin akan memperparah kesenjangan perkotaan-pedesaan (Gu, 2017a; Kanbur & Rauniar, 2010b). Dengan demikian, di daerah pedesaan, proyek infrastruktur yang sebagian besar dibiayai dari dana desa dan alokasi dana desa merupakan faktor eksogen yang bertujuan untuk merangsang perkembangan daerah tersebut (Riska Farisa et al., 2019). Tanpa adanya proyek tersebut, kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan akan semakin terasa. Dibandingkan dengan penduduk perkotaan, penduduk pedesaan memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur yang relatif rendah. Jalan pedesaan, tingkat penetrasi air, dan investasi aset tetap di pedesaan jauh dari perkotaan pada periode yang sama. Kesenjangan yang melebar antara daerah perkotaan dan pedesaan menghambat pertumbuhan investasi pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan dan menghalangi hak penduduk pedesaan atas pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Infrastruktur pedesaan merupakan faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan pemerataan.

Inklusivitas adalah kesempatan bagi setiap orang atau kelompok untuk berpartisipasi secara adil dalam pembangunan ekonomi dan berbagi hasil

pembangunan ekonomi. Pembangunan inklusif digunakan pada kesempatan dan konteks yang berbeda, tetapi konsep intinya sama. Pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai konsep multidimensi dalam literatur, yaitu pertumbuhan inklusif tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup serangkaian indikator seperti pemerataan sosial, kesempatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini, inklusi infrastruktur pedesaan mengacu pada fakta bahwa dalam keseluruhan siklus hidup infrastruktur pedesaan, setiap individu sama-sama menikmati manfaat yang dibawa oleh pembangunan infrastruktur tersebut.

Studi sebelumnya tentang pembangunan infrastruktur yang inklusif banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang ekonomi dan pembangunan (Alff, 2020; Berawi, 2017; Dolla et al., 2022; Fernholz, 2010; Gu, 2017a; Kanbur & Rauniyar, 2010b; Zhang, 2005). Sejauh penelusuran penulis, belum ada studi yang mengkaji topik ini dalam kerangka administrasi publik, khususnya kebijakan publik untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur inklusif melalui berbagai macam perspektif kebijakan publik. Oleh karena itu, studi ini akan mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji pembangunan inklusif berkelanjutan dari kacamata implementasi kebijakan publik, serta merekonstruksi sebuah model baru.

Studi ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan yang tidak semata-mata evaluatif, tetapi interpretatif dan kontekstual. Dengan mendasarkan diri pada kerangka konseptual, implementasi kebijakan yang secara umum mencakup dimensi kebijakan dicita-citakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Maka studi ini tidak hanya membongkar struktur formal kebijakan, tetapi juga menggali lapisan-lapisan makna, negosiasi antaraktor, dan nilai-nilai yang menggerakkan praktik kebijakan.

Inilah urgensi studi ini: membongkar dan merekonstruksi praktik implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dalam seluruh kompleksitasnya. Tidak cukup hanya membangun jalan dan jembatan. Hal yang lebih penting adalah membangun makna bersama tentang arah dan tujuan pembangunan itu sendiri. Studi ini berambisi merumuskan sebuah model

implementasi yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga reflektif terhadap realitas empirik, yang dapat diadaptasi dan direplikasi di wilayah lain dengan keragaman konteks serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana model implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur dapat dirumuskan berdasarkan praktik empiris di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menelaah proses, aktor, tantangan, dan capaian yang terjadi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah.
2. Merumuskan model implementasi kebijakan pembangunan inklusif berbasis infrastruktur yang kontekstual dan aplikatif berdasarkan praktik empiris di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dasar rekomendasi untuk penguatan kebijakan serupa di wilayah lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam studi ini antara lain:

1. Secara Teoretis: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks pembangunan inklusif berbasis infrastruktur, dengan menekankan pentingnya pendekatan relasional, nilai, dan kepemimpinan dalam proses kebijakan.

2. Secara Praktis: Menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang pendekatan implementatif yang lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual.
3. Secara Kebijakan: Memberikan masukan berbasis bukti untuk perumusan dan penyesuaian kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan infrastruktur sebagai medium transformatif, bukan sekadar proyek teknis.

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

- Abosedo, & Onakoya. (2014). *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship*, 1 (9), 146-164. 1(9), 1–18.
- ADB. (2005). *A new framework for infrastructure*.
- ADB. (2009). *Infrastructure for a Seamless Asia*.
- ADB. (2013). Framework of Inclusive Growth Indicators 2013. *Key Indicators for Asia and the Pacific*, 43.
- Aggarwal, S. C. (2021). Inclusiveness and the Progress of Indian States: Evidence from Inclusive Development Index Between 2011 and 2018. *Indian Journal of Human Development*, 15(2), 200–228. <https://doi.org/10.1177/09737030211008688>
- Alff, H. (2020). Negotiating coastal infrastructures: An evolutionary governance theory (EGT) approach to Chinese high-modernist development along the Indian Ocean. *Marine Policy*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103545>
- Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. H. (Eds.). (2013). *The international handbook of public financial management*. Palgrave Macmillan.
- Ali, I., & Yao, X. (2004). Inclusive Growth for Sustainable Poverty Reduction in Developing Asia: The Enabling Role of Infrastructure Development. *ERD Policy Brief No. 27*, 1–10.
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications* (ADB Economics Working Paper No. 97). Asian Development Bank. <https://ideas.repec.org/p/ris/adbewp/0097.html>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Armah, B., Keita, M., Gueye, A., Bosco, V., Ameso, J., & Chinzara, Z. (2014). Structural Transformation for Inclusive Development in Africa: The role of active government policies. *Development (Basingstoke)*, 57(3–4), 438–451. <https://doi.org/10.1057/dev.2015.9>

- Arnika, M., Rifdan, R., Arief, M. M., Halid, A. A. W., Taufik, A., & Hasrini, S. (2023). Collaboration between government agencies: Challenges and opportunities in public policy implementation. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67934>
- Artiles, A. J., Dorn, S., & Bal, A. (2020). Objects of protection, enduring nodes of difference: Disability interdependencies and citizenship in educational policy. *Educational Policy*, 34(5), 707–738. <https://doi.org/10.1177/0895904819874759>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
- Ascher, W., & Krupp, C. (2010). *Physical Infrastructure Development: Balancing the Growth, Equity, and Environmental Imperatives*.
- Awaworyi Churchill, S. (2020). Impact of microfinance on poverty and microenterprises. In *Moving from the Millennium to the Sustainable Development Goals: Lessons and Recommendations*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1556-9_14
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1).
- Baud, I. (2015). The emerging middle classes in India: Mobilizing for inclusive development? *European Journal of Development Research*, 27(2), 230–237. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.1>
- Bebbington, A., & Bury, J. (Eds.). (2013). *Subterranean struggles: New dynamics of mining, oil, and gas in Latin America*. University of Texas Press.
- Bendixen, M., Iversen, L. L., Best, J., Franks, D. M., Hackney, C. R., Latrubesse, E. M., & Tusting, L. S. (2021). Sand, gravel, and UN Sustainable Development Goals: Conflicts, synergies, and pathways forward. *One Earth*, 4(8), 1095–1111. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.07.008>
- Berawi, M. A. (2017). Designing national policy and strategies for inclusive development: Accelerating infrastructure development for growth and prosperity. *International Journal of Technology*, 8(5), 773–776. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v8i5.860>
- Bevir, M., & Rhodes, R. A. W. (2003). *Interpreting British Governance*. Routledge.
- Birkland, T. A. (2016). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th ed.). Routledge.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). "Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries." *World Development*, 30(6), 899–912.

- Booth, A. (2011). Splitting, splitting and splitting again: A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167(1), 31–59. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003604>
- Bonacin, R., Melo, A. M., Simoni, C. A. C., & Baranauskas, M. C. C. (2010). Accessibility and interoperability in e-government systems: Outlining an inclusive development process. *Universal Access in the Information Society*, 9(1), 17–33. <https://doi.org/10.1007/s10209-009-0157-0>
- Borie, M., Ziervogel, G., Taylor, F. E., Millington, J. D. A., Sitas, R., & Pelling, M. (2019). Mapping (for) resilience across city scales: An opportunity to open-up conversations for more inclusive resilience policy? *Environmental Science and Policy*, 99, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.014>
- Bourgeois, Y. (2014). The bumpy road to regional governance and inclusive development in greater moncton. In *Governing Urban Economies: Innovation and Inclusion in Canadian City Regions*.
- Brandão, L. E., Bastian-Pinto, C., Gomes, L. L., & Labes, M. (2012). Government Supports in Public–Private Partnership Contracts: Metro Line 4 of the São Paulo Subway System. *Journal of Infrastructure Systems*, 18(3), 218–225. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)IS.1943-555X.0000095](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000095)
- Brandao, L. E. T., & Saraiva, E. (2008). The option value of government guarantees in infrastructure projects. *Construction Management and Economics*, 26(11), 1171–1180. <https://doi.org/10.1080/01446190802428051>
- Brinkerhoff, D. W. (2003). Accountability and Health Systems: Toward Conceptual Clarity and Policy Relevance. *Health Policy and Planning*, 18(6), 371–379. <https://doi.org/10.1093/heapol/czg045>
- Buchner, D. L., O'Brien, M. J., Jahnke, L. R., & Louis, T. A. (2020). Community-based health programs and social inclusion: Toward a framework for evaluation. *Health Promotion International*, 35(3), 486–498. <https://doi.org/10.1093/heapro/daz052>
- Buhr, P., & Castiglioni, L. (2017). Family planning under financial constraints: Contraceptive use among women receiving means-tested unemployment benefits in Germany. *Advances in Life Course Research*, 32, 12–20. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2017.02.001>
- Bulkeley, H., Castán Broto, V., Hodson, M., & Marvin, S. (2012). *Cities and Low Carbon Transitions*. Routledge.

- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of geographical information systems*. Oxford University Press.
- Castor, J., Bacha, K., & Fuso Nerini, F. (2020). SDGs in action: A novel framework for assessing energy projects against the sustainable development goals. *Energy Research and Social Science*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101556>
- Centre for Development Studies. (2020). *Responsive governance in disaster recovery: A case study of Kerala's flood response*. CDS Working Paper Series.
- CGD. (2008). *The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development - IPS Nobel Laureate Lecture Series*. 0–5.
- Chakraborty, S., & Dutt, P. (2019). Spatial inequality and inclusive growth. *Economic and Political Weekly*, 54(12), 47–55.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chang, H. (2008). *Autoethnography as Method: Developing Qualitative Inquiry*. Left Coast Press.
- Chatani, K. (2012). Human capital and economic development. In *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth* (pp. 275–300). Anthem Press. <https://doi.org/10.7135/UPO9781843313786.010>
- Cheah, C. Y. J., & Liu, J. (2006). Valuing governmental support in infrastructure projects as real options using Monte Carlo simulation. *Construction Management and Economics*, 24(5), 545–554. <https://doi.org/10.1080/01446190500435572>
- Choragudi, S. (2013). Off-grid solar lighting systems: A way align India's sustainable and inclusive development goals. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 28, 890–899. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.028>
- Cornwall, A., & Brock, K. (2005). What do buzzwords do for development policy? A critical look at 'participation', 'empowerment' and 'poverty reduction'. *Third World Quarterly*, 26(7), 1043–1060. <https://doi.org/10.1080/01436590500235603>
- Cooper, H. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (4th ed.). Sage.

- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *SAGE Publications*.
- Cyr, J., & Goodman, S. W. (Eds.). (2024). *Doing Good Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Dai, E. (2016). China's inclusive development strategy and its effect on regional disparity. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 14(3), 263–278. <https://doi.org/10.1080/14765284.2016.1230696>
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications
- Dolla, T., Bisht, R., & Laishram, B. (2022). Smart Cities in the Development of Sustainable Infrastructure—Systematic Literature Review of Two Decades Research. In L. B. & T. A. (Eds.), *International Conference on Advances in Civil Engineering, ACE 2020* (Vol. 172, pp. 55–64). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4396-5_6
- Dörffel, C., & Schuhmann, S. (2022). What is Inclusive Development? Introducing the Multidimensional Inclusiveness Index. *Social Indicators Research*, 162(3), 1117–1148. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02860-y>
- Dror, Y. (2009). Training for Policy Makers. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0004>
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. *Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dupriez, L. H. (1987). The Relations between Expansion and the Progress of Economic Welfare. In *Economic Progress*.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. Washington, D.C.
- Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (2011). *Writing Ethnographic Fieldnotes* (2nd ed.). University of Chicago Press.

- Escobar, A. (1995). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Estache, A., Foster, V., & Wodon, Q. (2002). *Accounting for Poverty in Infrastructure Reform*.
- Estache, A., & Fay, M. (2009). *Current debates on infrastructure policy* (Commission on Growth and Development Working Paper No. 49). World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/27762>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Feng, T.-T., Kang, Q., Pan, B.-B., & Yang, Y.-S. (2019). Synergies of sustainable development goals between China and countries along the Belt and Road initiative. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 39, 167–186. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.10.008>
- Ferguson, J. (1994). *The anti-politics machine: “Development,” depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. University of Minnesota Press.
- Fernandes Antunes, A., Jacobs, B., de Groot, R., Thin, K., Hanvoravongchai, P., & Flessa, S. (2018). Equality in financial access to healthcare in Cambodia from 2004 to 2014. *Health Policy and Planning*, 33(8), 906–919. <https://doi.org/10.1093/heapol/czy073>
- Fernholz, R. M. (2010). Infrastructure and inclusive development through “free, prior, and informed consent” of indigenous peoples. In *Physical Infrastructure Development: Balancing the Growth, Equity, and Environmental Imperatives*. <https://doi.org/10.1057/9780230107670>
- Firman, T. (2009). Decentralization reform and local-government proliferation in Indonesia: Towards a fragmentation of regional development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2–3), 143–157. <https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00173.x>
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Fischer, F., & Forester, J. (Eds.). (1993). *The argumentative turn in policy analysis and planning*. Duke University Press.

- Fransisca, Y., Christianingsih, E., & Rukmana, A. R. (2020). Alih Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangauban Melalui Inovasi Produk. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(1). <https://doi.org/10.29407/ja.v4i1.14421>
- Frederickson, H. G. (2010). *Social equity and public administration: Origins, developments, and applications*. M.E. Sharpe.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Geertz, C. (1973). *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture*. Dalam *The Interpretation of Cultures* (hal. 3–32). Basic Books.
- Gibson, C. C. (2014). Politik pembangunan dan konflik lahan di Papua. Jakarta: LP3ES.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O'M., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. Jr. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scott Foresman & Company.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Goodin, R. E., Moran, M., & Rein, M. (2009). The Oxford Handbook of Public Policy. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001>
- Goodin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2009). The Public and its Policies. In *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0001>
- Goodman, B., & Hirschman, A. O. (1959). The Strategy of Economic Development. *Journal of Farm Economics*, 41(2), 468. <https://doi.org/10.2307/1235188>
- Gottweis, H. (2006). Argumentative Policy Analysis. In *Handbook of Public Policy* (pp. 461–480). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608054.n28>
- Gu, Q. (2017a). Integrating soft and hard infrastructures for inclusive development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 1(1), 1–3. <https://doi.org/10.24294/jipd.v1i1.29>
- Gu, Q. (2017b). Integrating soft and hard infrastructures for inclusive development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 1(1), 1–3. <https://doi.org/10.24294/jipd.v1i1.29>

- Gudynas, E. (2009). Ten theses on new extractivism: Extractivism and its consequences in Latin America. [Working Paper], Center for International Policy.
- Gupta, J., Pouw, N. R. M., & Ros-Tonen, M. A. F. (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *European Journal of Development Research*, 27(4), 541–559. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Handoyo, F., Hidayatina, A., & Purwanto, P. (2021). The Effect of Rural Development on Poverty Gap, Poverty Severity and Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 369–381. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.369-381>
- Harari, Y. N. (2015). *Sapiens: A brief history of humankind* (D. Carden, Trans.). Harper.
- Haug, P. (2021). Understanding inclusive education: Ideals and reality. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 65(4), 563–576. <https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1712666>
- Hendra Andy Mulia Panjaitan. Et al. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1)
- Hickey, S., Sen, K., & Bukenya, B. (Eds.). (2015). *The politics of inclusive development: Interrogating the evidence*. Oxford University Press.
- Hidayat, T., & Irawan, T. (2020). Dampak program listrik desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 135–150
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2009). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (2nd ed.). Sage.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.

- Holis, Y. M., Syabri, I., & Prabatmojo, H. (2018). An Examination of Regional Competitiveness: Early Findings from Banten, Indonesia. In H. D., B. T., F. F.Z., B. E., & W. H. (Eds.), *1st ITB Centennial and 4th PlanoCosmo International Conference on Infrastructure Development: Transforming beyond Borders, Starting the New Urban Agenda* (Vol. 158, Issue 1). Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/158/1/012050>
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. Routledge.
- Huang, Y., & Quibria, M. G. (2013). *WIDER Working Paper No . 2013 / 059 The global partnership for inclusive growth*.
- Indiahono, D. (2009). Mengubah Netralitas Birokrasi Klasik Menjadi Netralitas Birokrasi Baru: Suatu Telaah Politik Birokrasi. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 3(1), 31–46.
- Israr, M., Ross, H., Ahmad, S., Ahmad, N., & Pervaiz, U. (2020). Measuring multidimensional poverty among farm households in rural pakistan towards sustainable development goals. *Sarhad Journal of Agriculture*, 36(1), 130–142. <https://doi.org/10.17582/journal.sja/2020/36.1.130.142>
- Jin, D. J., & Stough, R. S. (1996). Agile Cities: The Role of Intelligent Transportation Systems in Building the Learning Infrastructure for Metropolitan Economic Development. *IEEE International Symposium on Technology and Society*, 448–456.
- Kanbur, R., & Rauniyar, G. (2010a). *Conceptualizing Inclusive Development*. 58.
- Kanbur, R., & Rauniyar, G. (2010b). Conceptualizing inclusive development: With applications to rural infrastructure and development assistance. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 437–454. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.516163>
- Kim, B. (2006). Infrastructure Development for the Economic Development in Developing Countries: Lessons from Korea and Japan. *GSICS Working Paper Series, Kobe University*, 11, 25.
- Kourula, A., Pisani, N., & Kolk, A. (2017). Corporate sustainability and inclusive development: highlights from international business and management research. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 14–18. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.003>

- Kumar, N. (2019). Towards a policy agenda for achieving SDGs in South Asia. In *Social Development and the Sustainable Development Goals in South Asia*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781351035262-9>
- Kumar, S., Tomar, S., & Verma, D. (2019). Women's financial planning for retirement: Systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Bank Marketing*, 37(1), 120–141. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0165>
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Lather, P. (1991). *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy With/In the Postmodern*. Routledge.
- Lee, J., Babcock, J., Pham, T. S., Bui, T. H., & Kang, M. (2022). Smart city as a social transition towards inclusive development through technology: a tale of four smart cities. *International Journal of Urban Sciences*. <https://doi.org/10.1080/12265934.2022.2074076>
- Leong, C., Tan, F. T. C., Tan, B., & Faisal, F. (2020). The emancipatory potential of digital entrepreneurship: A study of financial technology-driven inclusive growth. *Information and Management*. <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103384>
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation
- Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2013). *Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals* (6th ed.). Sage.
- Makbul, Y., Faoziyah, U., Ratnaningtyas, S., & Kombaitan, B. (2019). Infrastructure development and food security in Indonesia: The impact of the trans-Java toll road on rice paddy farmers' desire to sell farmland. *Journal of Regional and City Planning*, 30(2), 140–156. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2019.30.2.4>

- Manko, K., & Watkins, T. A. (2021). Microfinance and SDG 7: financial impact channels for mitigating energy poverty. *Development in Practice*. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1863338>
- Markevich, L. A., Shkarupa, E. A., & Grigoryeva, L. V. (2022). Drivers and Stoppers of Inclusive Development of Financial Services and Products in Modern Russia. In *Smart Innovation, Systems and Technologies* (Vol. 287). https://doi.org/10.1007/978-981-16-9804-0_18
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2011). *Designing qualitative research* (5th ed.). Sage.
- Mason, J. (2006). *Qualitative researching* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity–Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174.
- Mignolo, W. D. (2011). *The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options*. Duke University Press.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014a). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014b). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. In *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*.
- Mitchell, D., & McConkey, R. (2014). *Disability and Inclusive Development: A Guide for the Disability and Development Sector*. Routledge.
- Mgonja, B. E. S., & Malipula, M. (2024). Enhancing citizen engagement through dialogic governance: The case of Kinondoni Municipal Council in Tanzania. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 123–138. <https://doi.org/10.5296/jpag.v14i1.18640>
- Mohanty, S. K., Chatterjee, R., & Shaw, R. (2020). Building resilience of critical infrastructure: A case of impacts of cyclones on the power sector in Odisha. *Climate*, 8(6). <https://doi.org/10.3390/CLI8060073>
- Mohieldin, M., & Petkoski, D. (2017). Financing sustainable development: Ideas for action. In *World Bank Group*.

- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, 15(1), 179–202. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00739-z>
- Mun, H. W., Yee, L. S., & Tan, K. E. (2019). Mapping of literatures and indicators to sustainable development goals. *Journal of Sustainability Science and Management*, 14(6), 179–191.
- Nelson, J. R., Bienenstock, E. J., Palladino, A., Barrera, E., & Grubestic, T. H. (2022). Social infrastructure as a proxy for social capital: A spatial exploration into model specification and measurement impacts in Los Angeles, California. *Journal of Urban Affairs*. <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2133724>
- Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries. Oxford University Press.
- Nussbaum, M. C. (2001). *Upheavals of thought: The intelligence of emotions*. Cambridge University Press.
- Ocampo, J. A. (2017). Resetting the international monetary (non)system. Oxford University Press.
- OECD. (2016). *Road Infrastructure, Inclusive Development and Traffic Safety in Korea*.
- Oloruntoba, S. (2015). Politics of Financialisation and inequality: Transforming global relations for inclusive development. *Africa Development*, 40(3), 121–137.
- Osabuohien, E. S. (2020). *The Palgrave Handbook of Agricultural and Rural Development in Africa* Edited by.
- Otsuki, K., Schoneveld, G., & Zoomers, A. (2017). From land grabs to inclusive development? *Geoforum*, 83, 115–118. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.05.001>
- Permatasari, I. A. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). *The Journalish: Social and Government*, 1(1).
- Peters, B. G. (2009). The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration (6th ed.). Routledge.

- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. St. Martin's Press.
- Pieterse, E. (2010). *Development theory: Deconstructions/reconstructions*. SAGE Publications.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.
- Pink, S. (2001). *Doing visual ethnography: Images, media, and representation in research*. Sage
- Piselli, D., Loni, S. S., Colyard, K., & Nordquist, S. (2019). The role of youth in achieving the SDGs: Supporting youth-led solutions for sustainable food systems. In *Achieving the Sustainable Development Goals Through Sustainable Food Systems*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23969-5_13
- Popkova, E. G., Sergi, B. S., Haabazoka, L., & Ragulina, Y. V. (2020). *Inclusive development: Theory and policy*. Springer.
- Pouw, N., & Gupta, J. (2017). Inclusive development: A multi-disciplinary issue. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 104–108. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.013>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Pusat Studi Lingkungan Universitas Sriwijaya. (2021). *Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan*. UNSRI.
- Rauniyar, G., & Kanbur, R. (2010). Inclusive growth and inclusive development: A review and synthesis of Asian Development Bank literature. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 455–469. <https://doi.org/10.1080/13547860.2010.517680>
- Reckien, D., Creutzig, F., Fernandez, B., Lwasa, S., Tovar-Restrepo, M., Mcevoy, D., & Satterthwaite, D. (2017). Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. *Environment and Urbanization*, 29(1), 159–182. <https://doi.org/10.1177/0956247816677778>
- Rental B. and Grace A. Franklin Ripley. (1986). 'Police Implementation and Bureaucracy.' In *Chicago-Illionis*.
- Riska Farisa, B. M., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2019). Social Capital and Community Participation on Infrastructure Development in Pajaran Village, Malang Regency Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and*

- Environmental Science*, 239(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/239/1/012046>
- Rix, J., Sheehy, K., Fletcher-Campbell, F., Crisp, M., & Harper, A. (2013). Continuum of education provision for children with special educational needs: Review of international policies and practices. *European Journal of Special Needs Education*, 28(1), 1–14.
- Rodgers, G., & Rodgers, J. (2011). Inclusive development? Migration, governance and social change in rural Bihar. *Economic and Political Weekly*, 46(23), 43–50.
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.
- ROSENSTEIN-RODAN, P. N. (1963). PLANNING WITHIN THE NATION. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 34(2–3), 193–207. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8292.1963.tb00050.x>
- Rosser, A., Wilson, I., & Sulistiyanto, P. (2011). Leaders, elites and coalitions: The politics of free public services in decentralised Indonesia. Development Leadership Program (DLP) Research Paper. University of Adelaide.
- Rossmann, G. B., & Rallis, S. F. (2012). *Learning in the field: An introduction to qualitative research* (3rd ed.). Sage.
- Rubin, I. S. (2006). Budgeting. In *Handbook of Public Policy* (pp. 139–150). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608054.n8>
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sachs, J. D. (2005). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. Penguin Press.
- Sachs, J. D. (2012). *The price of civilization: Reawakening American virtue and prosperity*. Random House.
- Santika, W. G., Anisuzzaman, M., Bahri, P. A., Shafiullah, G. M., Rupf, G. V., & Urmee, T. (2019). From goals to joules: A quantitative approach of interlinkages between energy and the Sustainable Development Goals. *Energy Research and Social Science*, 50, 201–214. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.016>
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja*, 13, 65–80. <https://doi.org/10.21787/jpb.13.2021.65-80>

- Satterthwaite, D., & Mitlin, D. (2014). Reducing urban poverty in the Global South. Routledge.
- Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2012). Interpretive research design: Concepts and processes. Routledge.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Sengupta, U. (2013). Inclusive development? A state-led land development model in New Town, Kolkata. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(2), 357–376. <https://doi.org/10.1068/c1103>
- Shehu, H. (2018). Rural Development, Inclusive Growth and Poverty Alleviation: Nigerian and Indian Perspectives. *European Journal of Social Sciences Studies*, 3(3), 263–285. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1491712>
- Singh, R. K. (2013). Corporate social responsibility: A business solution for sustainable and inclusive development. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 6(12), 5–17. <https://doi.org/10.17010/pijom/2013/v6i12/60049>
- Shioji, E., Adhikari, R., Yoshino, N., & Hayashi, M. (2021). Inclusive infrastructure and governance reform in the digital era. *Asian Development Review*, 38(1), 1–24
- Skocpol, T., & Evans, P. B. (1985). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research. In P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), *Bringing the state back in* (pp. 3–37). Cambridge University Press.
- Smith, A., & Seward, A. (2020). Infrastructure and inclusive development: Institutional adaptation and innovation. *Journal of Development Studies*, 56(5), 834–850.
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). The Public Policy Theory Primer. Westview Press.
- Smith, B. C. (1985). *Desentralization : The Territorial Dimension of the State*. London : George Allen Unwin Publishers
- Smith, J., & Seward, P. (2020). Infrastructure politics: Social meanings in built environments. *Urban Studies*, 57(11), 2265–2283. <https://doi.org/10.1177/0042098020903266>
- Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 4(2), 197–209. doi:10.1007/bf01405732

- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. Guilford Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.
- Sutikno. (2019). Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 164–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jep.v17i2.11063>
- Svampa, M. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 244, 30–46.
- Swilling, M., Hajer, M., Baynes, T., Bergesen, J., Labbé, F., Musango, J. K., ... & Ramaswami, A. (2013). *Sustainable Resource Management for Cities*. United Nations Environment Programme.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Tangney, P. (2020). Dammed if you do, dammed if you don't: The impact of economic rationalist imperatives on the adaptive capacity of public infrastructure in Brisbane, Australia and Cork, Ireland. *Environmental Policy and Governance*, 30(6), 359–372. <https://doi.org/10.1002/eet.1893>
- Tatiek Mariyati. (2013). Public Policy Implementation Strategy in Encouraging Acceleration of Internet Users Development. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(Public Policy), 147–158.
- Triyanti, A., Bavinck, M., Gupta, J., & Marfai, M. A. (2017a). Social capital, interactive governance and coastal protection: The effectiveness of mangrove ecosystem-based strategies in promoting inclusive development in Demak, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 150, 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.017>
- Triyanti, A., Bavinck, M., Gupta, J., & Marfai, M. A. (2017b). Social capital, interactive governance and coastal protection: The effectiveness of mangrove ecosystem-based strategies in promoting inclusive development in Demak, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 150, 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.017>
- Triyowati, H., Masnita, Y., & Khomsiyah. (2019). How Indonesia's village fund, play a role in gender inequality expenditure per capita, and poverty. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 493–504. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083831109&partnerID=40&md5=2b7eb1e60929b04bb7bf150ed74eb9f7>

- UCLG (United Cities and Local Governments). (2016). Co-Creating the Urban Future: The Agenda of Metropolises, Cities and Territories. Fourth Global Report on Decentralization and Local Democracy (GOLD IV). UCLG.
- UN. (2018). Financing for development: progress and prospects. Report of the inter-agency task force on financing for development. In *United Nations* (Vol. 369, Issue 1).
- UN Department of Economic and Social Affairs, & The. (2021). World social report: Reconsidering rural development. In *World Social Report*.
- UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. <https://unhabitat.org/world-cities-report>
- UNDP. (2017). *United Nations Development Program (UNDPs) strategy for inclusive and sustainable growth*. 1–147.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2022). *Global assessment report on disaster risk reduction 2022*. <https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2022>
- United Nations Development Programme (UNDP) India. (2019). *Post-disaster recovery in Kerala: Institutional responses and policy insights*. <https://www.in.undp.org/>
- Utting, P., & Marques, R. (2010). Building infrastructure for sustainable development: Social meaning and power. *Journal of Political Ecology*, 17, 1–18.
- Valdivieso, P., & Andersson, K. P. (2018). What motivates local governments to invest in critical infrastructure? Lessons from Chile. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103808>
- van Leeuwen, B., & Földvári, P. (2016). The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 379–402. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2), 207–232.

- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2017). *Theories of the Policy Process* (4th ed.). Westview Press.
- Widodo, J. (2007). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winter, S. C. (2006). Implementation. In *Handbook of Public Policy* (pp. 151–166). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608054.n9>
- World Bank. (2013). Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0010-8>
- World Bank. (2013). Infrastructure for development. In *World development report 2013: Jobs* (pp. 178–183). World Bank.
- Xiaoyun, L., & Banik, D. (2013). The Pursuit of Inclusive Development in China: From Developmental to Rights-Based Social Protection. *Indian Journal of Human Development*, 7(1), 205–221. <https://doi.org/10.1177/0973703020130109>
- Yani, F., & Darmayanti, E. (2020). Implementasi nilai-nilai pancasila melalui pendidikan pancasila sebagai upaya membangun sikap toleransi pada mahasiswa di universitas potensi utama. *Jurnal Lex Justitia*, 2(1).
- Yanow, D. (1996). *How Does a Policy Mean? Interpreting Policy and Organizational Actions*. Georgetown University Press.
- Zhang, X. (2005). Paving the Way for Public–Private Partnerships in Infrastructure Development. *Journal of Construction Engineering and Management*, 131(1), 71–80. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2005\)131:1\(71\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:1(71))
- Živković, S. (2022). Empathy in leadership: How it enhances effectiveness. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/361952690_Empathy_in_Leadership_How_It_Enhances_Effectiveness
- Zoomers, A. (2018). Plantations are everywhere! between infrastructural violence and inclusive development. *Geoforum*, 96, 341–344. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.04.006>
- Zua, H., Rahman, A., & Lestari, M. (2021). Inclusive development and local participation: Lessons from community-based planning in Indonesia. *Journal of Development Practice*, 12(2), 101–119.
- Zuo, Y., Huang, Y., He, X., & Wang, C. (2021). Inclusive development and poverty alleviation in China: Fiscal intervention, institutional innovation,

and local empowerment. *Sustainability*, 13(3), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/su13031132>